



Implikasi Sistem Pertahanan Rudal AS terhadap Stabilitas Kawasan Asia

Rizki Roza^{*)}

Abstrak

Amerika Serikat (AS) berencana membangun sistem pertahanan rudal di Asia sebagaimana yang dibangun di Eropa. Rencana tersebut diklaim dilakukan untuk menghadapi ancaman keamanan dari Korea Utara. Sebagaimana Rusia terhadap sistem pertahanan rudal di Eropa, rencana tersebut akan menghadapi tantangan China yang tengah berupaya menjadi kekuatan dominan di kawasan, yang dalam bentuk apapun ekspresinya akan mempengaruhi stabilitas kawasan.

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu seorang pejabat senior Pentagon mengungkapkan, saat ini Amerika Serikat sedang berupaya membangun suatu sistem pertahanan rudal balistik regional di kawasan Asia, sebagaimana yang sedang dibangun di Eropa. Untuk itu, AS merencanakan dua rangkaian pembicaraan trilateral dengan Jepang dan Australia serta dengan Jepang dan Korea Selatan. Mengingat kontroversi yang ditimbulkan ketika AS berupaya membangun sistem pertahanan rudal di Eropa yang bahkan sempat memicu keretakan hubungan diplomatik antara AS dan Rusia, upaya AS di Asia tentunya juga dapat mempersulit hubungan AS dengan China yang khawatir sistem pertahanan tersebut dapat melemahkan kemampuan pertahanan mereka. Rencana AS tersebut tidak hanya akan berdampak kepada China sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas

keamanan kawasan secara keseluruhan, tak terkecuali Asia Tenggara.

Kebijakan Pertahanan Rudal AS

Pada awal tahun 2009, Presiden Obama menyetujui rekomendasi untuk merevisi rencana penggelaran sistem pertahanan rudal AS di Eropa yang sebelumnya direncanakan oleh pemerintahan Bush. Rencana baru tersebut dikenal dengan *the phased adaptive approach*, yang didasarkan pada penilaian terhadap ancaman rudal Iran, dan komitmen untuk menggelar teknologi yang sudah teruji, efektif biaya, dan dapat beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang terus berkembang. Sekalipun Iran dan Korea Utara masih merupakan aktor regional utama yang menjadi sumber kekhawatiran AS, rencana baru tersebut belum mengungkapkan keinginan untuk membangun sistem pertahanan di Asia,

^{*)} Calon Peneliti bidang Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rizki.roza@dpr.go.id

serupa sebagaimana yang dibangun di Eropa. Demikian pula halnya dengan dokumen *Ballistic Missile Defense Review Report* yang dirilis pada February 2010 lalu, tidak menyinggung mengenai rencana membangun sistem pertahanan rudal di Asia. Laporan tersebut secara jelas menyebut Korea Utara, Iran, dan Siria sebagai aktor regional dengan kemampuan rudal balistik jarak pendek, menengah, dan jauh, yang dapat mengancam pasukan AS, negara-negara sekutu, dan sahabat di kawasan di mana AS menggelar pasukan atau mempunyai hubungan kerja sama keamanan dengan AS, namun tidak menunjukkan urgensi pembangunan suatu sistem pertahanan rudal yang komprehensif di Asia.

Selam ini, untuk menghadapi ancaman rudal Korea Utara, AS mengandalkan penggelaran rudal pencegat di Alaska dan California, dengan dukungan sistem pertahanan rudal berbasis laut yang dapat dioperasikan dari kapal angkatan laut. Kerja sama pertahanan rudal di Asia Timur selama ini masih berbasis hubungan kerja sama bilateral untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan masing-masing negara sekutu AS. Selain itu, AS juga menggunakan jalur diplomasi, memanfaatkan berbagai forum perundingan untuk membujuk Korut agar menghentikan program pengembangan rudalnya, seperti kesepakatan yang sempat tercapai beberapa waktu lalu yang menyatakan Korut bersedia membekukan kegiatan nuklir dan penghentian uji coba rudal dengan imbalan 240.000 ton bantuan pangan dari AS.

Dengan demikian, rencana AS untuk membangun sistem pertahanan rudal di Asia tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan AS untuk kembali meningkatkan kehadirannya dan untuk memainkan peran lebih besar, serta jangka panjang di kawasan Asia-Pasifik, sebagaimana yang berulang kali ditegaskan oleh Pemerintahan Obama. Rencana tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya AS untuk meyakinkan negara-negara sekutu dan sahabat di kawasan bahwa AS masih memegang komitmennya untuk melindungi keamanan mereka, termasuk dari ancaman rudal Korea Utara, sekalipun AS tengah mengalami pemotongan anggaran pertahanan.

Ancaman Rudal Korea Utara

Korea Utara telah memulai upayanya untuk memperoleh kapabilitas rudal balistik sejak awal tahun 1960-an. Pada akhir 1970, program pengembangan rudal menjadi prioritas nasional sejajar dengan program nuklir. Pada April 1984, Korea Utara melakukan ujicoba pertama rudal Scud-B, dan berhasil. Kapabilitas tersebut berawal dari akuisisi rudal dan transfer teknologi dari Uni Soviet dan China selama periode 1960-1989. Sejak keberhasilan ujicoba Scud-B, Korut mulai melakukan berbagai pengembangan dan ujicoba rudal lainnya, dimulai dengan pengembangan rudal Nodong pada tahun 1988.

Rudal Nodong pertama kali diujicoba pada tahun 1993 dengan jangkauan 500 km, dan kemudian mengalami ujicoba kembali dengan jangkauan 1300 km pada Juli 2006. Saat itu diketahui bahwa Korut melakukan sejumlah ujicoba peluncuran dan berhasil. Hal itu menunjukkan kapabilitas Korut untuk mencapai target pasukan AS dan sekutunya di Korea Selatan dan Jepang. Pada Juli 2009, Korut kembali melakukan ujicoba yang menunjukkan kemampuannya untuk mengancam keamanan pasukan AS dan sekutunya di Jepang dan Korea Selatan dengan meluncurkan tujuan rudal balistik. Hingga saat ini diperkirakan Korut telah menggelar antara 175-200 rudal Nodong.

Korut juga telah memamerkan rudal Musudan yang diperkirakan memiliki kemampuan jangkauan antara 2500-4000 km, meskipun belum pernah menjalani ujicoba peluncuran. Selain itu, Korut juga memiliki berbagai rudal lainnya dengan beragam jangkauan, baik yang sudah menjalani ujicoba peluncuran maupun belum, yaitu antara lain: varian rudal Nodong yang sudah dipamerkan pada Oktober 2010; Taepodong-1 dengan jangkauan 1800 km; dan Taepodong-2 yang diperkirakan memiliki jangkauan inter-kontinen. Peluncuran roket Unha-3 oleh Korea Utara yang akan dilaksanakan antara 12 sampai 16 April ini juga diyakini oleh pihak Barat sebagai suatu ujicoba terselubung atas rudal yang memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir di masa depan. Sementara pihak Korut mengklaim bahwa roket tersebut digunakan untuk meluncurkan

satelit observasi Kwangmyongsong-3 guna menandai perayaan ulang tahun mantan Presiden Kim Il Sung pada 15 April.

Persoalan keamanan di Semenanjung Korea selalu dibayangi oleh perkembangan kemampuan senjata nuklir dan rudal Korea Utara. Kapabilitas rudal yang dimiliki Korea Utara tersebut di ataslah yang mungkin menjadi salah satu faktor pendorong AS untuk merencanakan pembangunan sistem pertahanan rudal dalam rangka menjamin keamanan pasukannya, negara-negara sekutu dan sahabat di kawasan.

Implikasi terhadap Stabilitas Kawasan

Selama perang dingin, upaya AS dan Uni Soviet untuk membangun sistem pertahanan rudal dibatasi oleh the *ABM Treaty (the US-Soviet Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems)* yang ditandatangani pada 26 Mei 1972, dan mulai berlaku sejak bulan Oktober di tahun yang sama. Perjanjian tersebut menetapkan sejumlah pembatasan berkaitan dengan pengembangan, ujicoba, ataupun penggelaran sistem pertahanan rudal balistik, baik yang berbasis laut, basis udara, basis angkasa, maupun yang bergerak berbasis darat. Perjanjian ini lahir karena adanya kesadaran kedua pihak, yaitu AS dan Uni Soviet, akan kepemilikan persediaan senjata nuklir dan sistem peluncurnya yang sudah mencapai level yang cukup tinggi sehingga mendorong mereka melakukan pembatasan yang saling menguntungkan demi kepentingan nasional masing-masing. Kedua kekuatan mempertimbangkan suatu kondisi yang lebih rendah resiko dan rendah biaya berkaitan perimbangan kekuatan nuklir mereka, menghindari akumulasi persenjataan yang tidak terbatas. Pembatasan pengembangan sistem pertahanan rudal ini juga dimaksudkan untuk menjaga efektifitas *nuclear deterrence*, karena negara dengan kapabilitas sistem pertahanan rudal yang memadai akan lebih berani untuk melakukan serangan nuklir sehingga pecahnya perang nuklir akan semakin sulit dihindari. Namun perjanjian ini sudah tidak berlaku sejak presiden Bush memasuki pemerintahan dan memutuskan mundur dari *ABM Treaty*, serta

sejak itu pula kontroversi sistem pertahanan rudal di Eropa dimulai.

Jika upaya AS untuk membangun sistem pertahanan rudal di Eropa telah memicu tentangan dari Rusia, maka demikian pula halnya dengan di Asia. Rencana AS tersebut mungkin dapat memancing tentangan dari China. Bahkan ada pandangan yang mengatakan bahwa China akan menentang jauh lebih keras daripada Rusia berkaitan dengan sistem pertahanan rudal. China tentunya mempertanyakan alasan AS mengembangkan sistem tersebut dan mengkhawatirkan potensi berkembangnya teknologi dari sistem tersebut. Sekalipun AS terus mengklaim bahwa langkah tersebut hanya ditujukan untuk melindungi pasukan AS yang digelar, negara-negara sekutu, dan negara sahabat lainnya di kawasan dari ancaman serangan negara-negara seperti Iran dan Korea Utara, serta untuk membantu mempertahankan AS dari serangan rudal-rudal jarak jauh yang mungkin dikembangkan kedua negara tersebut, tidak demikian persepsi yang berkembang di pihak China. Bagi China, semakin berkembangnya teknologi rudal pencegat AS akan menjadi ancaman bagi kekuatan nuklir strategis mereka.

Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian China berkaitan dengan pengembangan sistem pertahanan rudal AS, yaitu: *Pertama*, sistem tersebut dapat melemahkan kemampuan 'serangan balasan' China; *Kedua*, penelitian dan pengembangan pertahanan rudal dapat saja menghasilkan terobosan-terobosan yang implikasinya belum dapat diperhitungkan China, dan sulit untuk dihadapi atau ditandingi; dan *Ketiga*, pengembangan tersebut juga dapat menghasilkan kemajuan teknologi luar angkasa sehingga memungkinkan mempersenjatai luar angkasa.

Sementara sistem pertahanan rudal yang dikembangkan AS di Eropa sesungguhnya tidak menjadi ancaman signifikan terhadap kemampuan Rusia untuk melakukan serangan balasan, sistem tersebut menimbulkan dampak yang berbeda bagi arsenal nuklir China yang relatif lebih kecil dan kapabilitas rudal China yang cukup rentan jika berhadapan dengan sistem tersebut. Mengingat besarnya ambisi

China untuk menjadi kekuatan utama di kawasan, maka sangat mungkin China akan bereaksi keras jika *nuclear deterrence*-nya dilemahkan. Kondisi ini akan memojokkan China dan mendorong China untuk berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan, baik melalui pengembangan senjata nuklirnya, atau dengan mengembangkan teknologi rudalnya, maupun dengan mengembangkan sistem anti-pertahanan rudal dan semacamnya. Posisi China yang terpojok dikhawatirkan juga dapat memicu China untuk bersikap lebih agresif dalam menyelesaikan berbagai isu-isu keamanan di kawasan, sebagaimana yang ditunjukkan belakngan ini.

Penutup

Tidak dapat dipungkiri bahwa rencana AS membangun suatu sistem pertahanan rudal di Asia tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan AS untuk kembali meningkatkan kehadirannya di kawasan Asia-Pasifik. Dapat dipahami pula bahwa kapabilitas rudal Korea Utara yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan menjangkau negara-negara sekutu AS, telah mendorong AS untuk membangun sistem pertahanan rudal di kawasan tersebut. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa rencana AS tersebut dapat memicu reaksi keras China, menyulut sikap agresif China, serta memulai sebuah perlombaan senjata baru di kawasan.

Bagi Indonesia yang selama ini bersama-sama negara anggota ASEAN lainnya terus berupaya merangkul kekuatan-kekuatan besar tersebut dalam menyelesaikan isu-isu keamanan di kawasan melalui cara-cara damai, tentunya kondisi yang digambarkan di atas akan menjadi persoalan besar. Dampak yang dapat secara langsung dirasakan tentunya pada penyelesaian sengketa di Laut China Selatan

yang melibatkan sejumlah negara anggota ASEAN. Upaya ASEAN untuk mendorong China menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dengan cara-cara damai tentunya akan berbenturan dengan sikap China yang semakin agresif karena terpojokkan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia, bersama-sama negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mengingatkan AS agar komitmennya untuk kembali meningkatkan kehadiran di kawasan Asia-Pasifik demi memberikan jaminan keamanan bagi negara-negara sekutunya, tidak mengorbankan keamanan negara-negara sahabatnya di kawasan. AS hendaknya menjunjung tata baru keamanan dalam kesetaraan, pembangunan bersama, penggalangan dan saling menguntungkan, serta mencoba menegakkan keamanan untuk semua.

Rujukan:

1. "Debating Missile Defence," <http://the-diplomat.com/2011/09/17/debating-missile-defence/>, diakses 5 April 2012.
2. "Department of Defense, Ballistic Missile Defense Review Report, February 2010," <http://www.defense.gov/news/BMDR.pdf>, diakses 5 April 2012.
3. Goldblat, Jozef. 2002. *Arms Control: New Guide to Negotiations and Agreements*. London: Sage Publication.
4. "North Korea: Country Profiles," <http://www.nti.org/country-profiles/north-korea/>, diakses 5 April 2012.
5. "The Phased Adaptive Approach," <http://www.mda.mil/system/paa.html>, diakses 5 April 2012.
6. "U.S. seeks missile-defense shields for Asia, Mideast," <http://www.reuters.com/article/2012/03/27/us-usa-asia-missile-idUSBRE82Q02420120327>, diakses 5 April 2012.